

BAB V

KESIMPULAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah terutama pada sektor kehutanan. Banyaknya produksi kayu dari hutan di Indonesia seakan menjadi magnet bagi para pengusaha yang menggunakan kayu sebagai bahan baku produksi mereka. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan kayu dengan jumlah yang sangat banyak, salah satunya dengan tindakan illegal logging/penebangan liar. Pemerintah Indonesia berupaya memberantas penebangan liar yang terjadi dengan menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Melalui kerja sama Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) - Voluntary Partnership Agreement (VPA) dengan Uni Eropa, pemerintah Indonesia memastikan hanya kayu yang telah lulus uji verifikasi yang dapat di ekspor ke Uni Eropa. Mengingat, Uni Eropa hanya menerima kayu yang telah mendapat sertifikat legal dari Negara produsen.

Pemerintah sebagai aktor pembuat keputusan berperan penting dalam perdagangan kayu dengan Uni Eropa. SVLK merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memberikan identitas kayu yang akan di ekspor ke Uni Eropa sebagai kayu yang dalam proses produksinya melalui tahap yang benar. Tindakan pemerintah membuat kebijakan seperti ini sebagai upaya pemberantasan illegal logging dan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Sama halnya dengan Uni Eropa yang hanya menerima kayu dengan legalitas yang jelas, kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa selain sebagai bentuk perdagangan multinasional, juga sebagai bentuk pemanfaatan hasil hutan dengan baik dan benar.

Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)-VPA hadir sebagai bentuk kerja sama dengan pengelolaan kekayaan alam yang dapat dipertanggung jawabkan. Disini peran pemerintah Indonesia sebagai fasilitator antara produsen kayu lokal dengan importir dari Uni Eropa. Dengan adanya sertifikat legal yang dimiliki oleh produsen kayu lokal, tidak lagi menjadi hal yang sulit untuk mengekspor kayu dari Indonesia ke Uni Eropa. Kerja sama FLEGT-VPA antara UE dan Indonesia sebagai hubungan bilateral yang saling menguntungkan ke dua belah pihak.

Selain sebagai bentuk investasi Negara atas perdagangan kayu dengan Uni Eropa, diterapkannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai upaya penegakkan hukum hutan di Indonesia agar kayu hasil hutan tidak asal ditebang dan di ekspor dengan ilegal. Jadi, produsen yang telah memiliki sertifikasi legal dari pemerintah, kayu yang di ekspor ke Uni Eropa tanpa melalui pengujian lagi keabsahannya. Dengan kata lain, kayu yang diterima oleh Uni Eropa adalah kayu yang telah bersertifikasi legal.

Pasca penerbitan lisensi FLEGT, terjadi peningkatan ekspor kayu Indonesia secara signifikan. Terjadi pelonjakan yang cukup tinggi pada kuartal pertama 2017 ekspor kayu Indonesia mencapai 1,75 miliar dolar AS. Hal ini menjadi sesuatu yang positif terhadap investasi Negara. Sebagai Negara yang memiliki dokumen V-Legal oleh Uni Eropa, produsen kayu di Indonesia dapat semakin mudah dalam perdagangan kayu karena tidak perlu memikirkan lagi kayu yang di ekspor ke Uni Eropa ditolak. FLEGT menjadi akses bagi para produsen kayu Indonesia terhadap perdagangan global, terutama Uni Eropa sebagai mitra kerja sama dengan Indonesia.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi reformasi industri kehutanan Indonesia. Dengan adanya kerja sama FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa, tidak hanya membuat akses pasar produksi kayu dari Indonesia

semakin meluas, namun hal ini juga sebagai langkah untuk pemberantasan tindakan illegal logging yang sangat marak terjadi di Indonesia. Kesadaran akan pengelolaan hutan Indonesia menjadi fokus dalam kerja sama ini. Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa membuat para produsen kayu swasta Indonesia menjadi lebih sadar bahwa kayu yang bisa diperdagangkan hanyalah kayu yang memiliki standarisasi seperti apa yang diinginkan oleh Uni Eropa.

Adanya kebijakan dari Uni Eropa untuk hanya menerima kayu legal membuat para produsen kayu terutama Indonesia harus membuat standar legal dari kayu yang diproduksi. Dengan hal ini, pemerintah Indonesia kemudian menjalin kerja sama dengan Uni Eropa untuk melakukan perdagangan kayu legal. Proses negosiasi FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa terjadi cukup panjang dengan Kementerian Kehutanan sebagai penanggung jawab penuh atas kerja sama ini.

Disamping Kementerian Kehutanan, ada pula unsur pendukung dalam kesuksesan kerja sama FLEGT antara lain; Departemen Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, dan Departemen Keuangan. Kementerian Hukum juga terlibat dalam proses negosiasi kerja sama ini sebagai jaminan atas legalitas kayu yang diperdagangkan oleh kedua pihak. SVLK dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal.

Disamping peran pemerintah sebagai negotiator dan aktor dalam pembuatan keputusan, ada pula peran dari NGO yang turut membantu dalam jalinan kerja sama FLEGT antara Indonesia dengan Uni Eropa. Sebagaimana pada tahun 1993, kelompok kerja pada Ekolabel Indonesia memprakarsai pengembangan sertifikasi kayu yang berkelanjutan pertama di Indonesia. Hal ini juga didasari pada respon masyarakat Eropa akan kelangsaan lingkungan hidup dan maraknya

penebangan liar serta perdagangan ilegal produk hasil hutan yang terjadi secara global

Non Government Organization (NGO) berperan cukup penting sebagai penekan dibuatnya kebijakan yang mengatur perdagangan hasil hutan dengan tidak mengesampingkan fungsi hutan itu sendiri. Adanya keprihatinan akan masalah pembalakan liar dan perdagangan hasil hutan secara illegal mendorong para kelompok pemerhati lingkungan melakukan advokasi yang mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan tentang bagaimana pengelolaan sumber hutan sehingga apa yang dihasilkan tidak hanya menjadi keuntungan bagi mereka yang melakukan “jalan pintas”, namun juga menjadi sumber investasi bagi Negara.

Adanya peran pemerintah sebagai aktor pusat dalam kebijakan yang di ambil serta adanya peran NGO sebagai pendorong dihasilkannya kebijakan tersebut berujung pada Negara sebagai hasil alam yang menjadi investasi penting jangka panjang. Dengan diberlakukannya tata kelola pemanfaatan hasil alam, kepentingan nasional Negara pun dapat tercapai. Kesejahteraan ekonomi nasional menjadi aspek penting yang harus dijaga. Kekayaan alam yang dimiliki suatu Negara menjadi modal untuk kelangsungan hidup suatu bangsa. Sektor pertahanan menjadi titik untuk menjaga hal itu dari ancaman klaim atau kegiatan-kegiatan illegal yang mengambil hasil dari alam. Dengan adanya kerja sama FLEGT-VPA dan dibuatnya SVLK tidak hanya memberi kemudahan bagi para produsen swasta (dibawah pengawasan Negara) untuk mengakses pasar internasional, namun juga sebagai rangkaian aturan yang mengikat setiap komponen di dalamnya untuk tidak dengan mudah memanfaatkan hasil hutan secara bebas tanpa memikirkan dampak yang terjadi di kemudian hari.